

REVIEW BUKU
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RETORIKA
DI ASIA TENGGARA

BOOK REVIEW
DEMOCRACY, RIGHTS AND RHETORIC IN SOUTHEAST ASIA

Pandu Prayoga

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan
E-mail: panduprayoga.p2p@gmail.com

Diterima: 1 Oktober 2021; direvisi 14 November 2021; disetujui 27 November 2021

Judul Buku : *Democracy, Rights, and Rhetoric in Southeast Asia*
Penulis : Avery Poole
Penerbit : Palgrave Macmillan
Tahun Terbit : 2019
Tebal : 83+xi

Abstract

Democracy and human rights in ASEAN have many faces due to different interpretations and lack of implementations. Various definitions of democracy and human rights are generated from several political systems in the Southeast Asia. International community is concerning how ASEAN member states could take responsibility in implementing and respecting human rights. This review shows the difference between upholding human rights agreement in the regional level and violating it in the domestic level. Such condition is driven by external regional legitimacy and defined by ASEAN's leaders. However, the challenges of democracy and human rights norms in ASEAN are to serve people's interests not just as a rhetoric.

Keywords: ASEAN, democracy, legitimacy, rhetoric, rights

Abstrak

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN memiliki banyak wajah karena adanya perbedaan penafsiran dan lemahnya penerapan di lapangan. Beragamnya penafsiran mengenai demokrasi dan HAM disebabkan oleh beragamnya sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara. Penegakan dan penghormatan terhadap HAM menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan internasional, baik di negara anggota yang demokratis maupun tidak. Tulisan ini menyoroti perbedaan antara kesepakatan di tingkat ASEAN yang mendorong demokrasi dan HAM serta pelanggaran di level domestik yang masih terjadi. Penulis buku berpendapat bahwa pengakuan atau legitimasi dari komunitas internasional penting agar ASEAN dapat menjadi bagian dari komunitas global. Selain itu, pemimpin kawasan memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan nilai-nilai demokrasi dan ham menurut versinya. Bagaimanapun, tantangan ke depan bagi ASEAN yaitu bagaimana demokrasi dan HAM dapat fokus pada rakyat, dan bukan hanya sekedar retorika.

Kata kunci: ASEAN, demokrasi, legitimasi, retorika, hak

Pendahuluan

Pengambilalihan paksa kekuasaan oleh militer dan pelanggaran HAM di Myanmar pada awal tahun 2021 membuka kembali diskusi tentang paradoks demokrasi yang dipromosikan oleh ASEAN. Paradoks yang selalu mengundang kritik, baik dari masyarakat internal dan maupun internasional. Di tingkat regional, negara-negara anggota memiliki komitmen dalam promosi dan penghormatan nilai-nilai demokratis yang tecermin di dalam Piagam ASEAN. Sayangnya pada politik di tingkat domestik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Piagam tersebut. Mengapa paradoks ini terjadi?

Hubungan Internasional menawarkan beberapa perspektif dalam menjawab fenomena tersebut. Realisme memandang bahwa dengan basis anarki dan *power*, negara berusaha untuk bertahan hidup dan menjaga kedaulatan di lingkungan internasional yang anarkis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, keberadaan ASEAN dapat diterima oleh dunia internasional sekalipun anggotanya masih dalam proses atau bukan negara demokratis. Perspektif liberalisme memandang pengakuan norma demokrasi dan penghormatan HAM oleh ASEAN menandakan kemajuan proses regionalisme. Selain itu, konflik internal negara anggota ASEAN akan mengurangi tensi, jika seluruh negara menghormati demokrasi. *English School* mengambil jalan tengah dengan mengakui lingkungan anarki sekaligus membangun komunitas regional berdasarkan norma dan perilaku bersama. Sementara konstruktivisme melihat kepentingan bersama kawasan dibentuk dari identitas diri dan persepsi dunia internasional terhadap ASEAN.

Salah satu sarjana Hubungan Internasional yang menggunakan pendekatan institusionalis dan konstruktivisme sekaligus dalam melihat paradoks tersebut adalah Avery Poole. Dalam bukunya berjudul "*Democracy, Rights and Legitimacy in Southeast Asia*", Poole memotret para pemimpin ASEAN yang sedang membangun retorika norma yang dilembagakan dalam Piagam ASEAN. Poole berargumen bahwa ASEAN berupaya memproyeksikan dirinya sebagai sebuah institusi yang relevan

kepada dunia internasional dengan mengadopsi norma yang secara dominan berlaku, yaitu demokrasi dan penghormatan HAM. Perbedaan tingkat ekonomi dan jenis sistem politik pemerintahan tidak serta merta membendung ASEAN menjadi bagian dari komunitas internasional yang menjunjung norma-norma demokrasi dan HAM. Justru dengan ASEAN mengadopsi prinsip norma ini akan lebih mengeratkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan pihak eksternal.

Internalisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM bukan tanpa halangan dan rintangan di tengah sejarah panjang kepemimpinan diktator di Asia Tenggara. Apalagi demokrasi dan HAM dianggap oleh beberapa pemimpin di ASEAN sebagai bentuk hegemoni dan pelebaran pengaruh negara-negara besar. Sebagaimana yang dikemukakan Mahatir Muhammad tidak ingin didikte oleh seperangkat aturan dan kumpulan nilai yang diekspor dari Barat karena telah memiliki "Asian Values" (T.N. Harper, 1997). Terlepas dari kondisi ini, Indonesia yang pernah mengalami periode otoritarianisme terus mengupayakan prinsip demokrasi dan HAM menjadi acuan perilaku normatif dan aplikatif bagi negara anggota ASEAN. Perilaku negara-negara ASEAN akan terbentuk dari interaksi terus-menerus yang dilandasi oleh komitmen bersama. Tentunya hasil yang diharapkan adalah prinsip demokrasi dan HAM menjadi standar perilaku yang diterapkan di wilayah yurisdiksi masing-masing negara.

Buku ini mengangkat kasus Myanmar sebagai negara yang masih tertatih dalam mempelajari demokrasi dan penguatan HAM. Tidak semua negara-negara di Asia Tenggara mengadopsi sistem politik yang demokratis dan menghormati HAM, salah satunya seperti kasus yang diangkat dalam buku ini, yaitu Myanmar. Buku yang ditulis Avery Poole ini mengungkap perbedaan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai retorika dan sebagai fakta sosial di negara anggota ASEAN. Poole membagi bukunya menjadi 4 bagian dalam menjabarkan argumentasinya. Di bagian pertama membahas konsepsi HAM dan demokrasi di Asia Tenggara. Bagian kedua membahas demokrasi dari sisi retorika dan implementasi di lapangan. Bagian

ketiga dari buku ini menjabarkan persoalan kelembagaan HAM termasuk mengulas Piagam ASEAN. Bagian terakhir menegaskan kembali hubungan dan relevansi antara nilai-nilai HAM dan demokrasi dengan ASEAN.

Dalam mereviw buku tersebut, tulisan ini dibagi dalam tiga pembahasan. Bagian pertama mencoba menggunakan dan menjabarkan kerangka konsep demokrasi ala ASEAN. Bagian kedua mengeksplorasi keragaman sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara termasuk klaim demokrasi oleh negara-negara ASEAN. Argumentasi utama bagian kedua yaitu pengadopsian nilai demokrasi dan HAM oleh ASEAN didorong oleh persepsi dunia internasional agar ASEAN menjadi bagian masyarakat internasional. Bagian terakhir menyimpulkan ASEAN mengadopsi nilai-nilai liberalisme berupa demokrasi dan HAM karena dorongan *external regional legitimacy* (ERL).

Konsep Demokrasi ala ASEAN

Poole mengawali bahasannya dengan mengutarakan kasus pelanggaran HAM oleh penguasa di Myanmar terhadap kaum Buddhis pada September 2007. Bukan hanya di Myanmar, kasus pelanggaran HAM terjadi hampir di seluruh negara ASEAN meskipun dengan tingkat yang berbeda (Inayati, 2016). Di sisi lain, pada November 2007 para pemimpin ASEAN menyetujui sebuah aturan dan norma berupa Piagam ASEAN yang dapat mengikat perilaku negara anggota. Terang saja, apa yang terjadi di level domestik bertolak belakang dengan nilai-nilai yang didorong di tingkat ASEAN. Dalam menjawab paradoks ini, Poole mengajukan konsep *external regional legitimacy* (ERL) sebagai penjelasan konstruksi identitas ASEAN.

Dorongan untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan HAM bukan karena penerimaan nilai-nilai internasional tetapi lebih pada legitimasi, reputasi, kredibilitas, dan kesan ASEAN di mata dunia. Konsep demokrasi dan HAM ditambah dengan embel-embel berakar dari karakter masyarakat Asia Tenggara agar menjadi berbeda dengan demokrasi ala Barat. Demokrasi dan HAM ala ASEAN didukung

oleh beragamnya identitas yang dimiliki oleh masyarakat Asia Tenggara dengan standar kepatutan perilaku tertentu. Setiap anggota ASEAN memiliki perbedaan dalam aspek politik, ekonomi, dan sejarah. Dengan latar belakang sejarah sebagai negara jajahan (kecuali Thailand), negara-negara ASEAN menolak ikut campur urusan domestik sesama anggota. Ketika terjadi pelanggaran HAM misalnya, tidak ada ketegasan ASEAN untuk menghentikan pelanggaran. Harapan ASEAN memiliki dokumen yang mengikat secara hukum agak sulit tercapai akibat karakteristik “ASEAN Way” yang mengedepankan level kenyamanan bersama, kesabaran, evolusi, informalitas, pragmatisme, dan konsensus (Poole, 2019).

Kesepakatan norma dan nilai ASEAN umumnya dibentuk oleh kaum elit atau pemimpin puncak masing-masing negara. Persepsi dan tafsir para pemimpin ASEAN menjadi sangat dominan dalam menentukan retorika dan realitas lapangan. Buku ini, misalnya, menyorot ucapan Presiden Joko Widodo yang memandang demokrasi di Indonesia sudah kebablasan, tetapi dalam beberapa laporan justru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Eksekusi mati tanpa pengadilan dengan dalih pemberantasan narkoba justru dipromosikan oleh Filipina di bawah rezim Duterte. Pasca berlakunya Piagam ASEAN 2007, Myanmar melakukan reformasi di tahun 2010. Sayangnya, pengaruh militer masih sangat kuat termasuk dalam peraturan dan perundang-undangan. Beberapa tahun kemudian, kekerasan tersebut berulang terhadap suku-bangsa Rohingya sekalipun Myanmar berada di bawah pemimpin sipil. Pada awal tahun 2021, dunia internasional dikejutkan dengan kudeta militer dan ratusan orang yang dilaporkan hilang saat melakukan demonstrasi menentang kudeta. Myanmar seolah lupa akan komitmen bersama ASEAN terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga negara menjadi subordinat dari perebutan kekuasaan politik. Pesimisme mengenai Piagam ASEAN dalam mempromosikan demokrasi dan menghormati HAM telah disuarakan oleh kelompok swadaya masyarakat yang meluncurkan Piagam tandingan berupa ASEAN

People Charter (Sinaga, 2013).

Norma dan nilai-nilai yang dipromosikan di ASEAN tidak lahir dari ruang hampa, tetapi dipromosikan oleh aktor dan agen, baik dari dalam maupun dari luar ASEAN yang aktif membentuk komunitas sekitar. Dalam buku ini, Poole (2019) memaparkan tujuan ASEAN mempromosikan norma demokrasi dan HAM adalah agar diterima sebagai bagian dari komunitas internasional walaupun sebatas retorika tanpa implementasi nyata. Demokrasi ala ASEAN bermakna bahwa sekalipun para pemimpin kawasan mengadopsi nilai dan norma liberal di tingkat regional, hal ini tidak berarti bahwa adopsi dari nilai dan norma liberal juga berada di level yang sama pada tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa ASEAN masih tidak beranjak pergi dari lingkaran elitisnya dan selalu bermain dengan slogan-slogan retorik. Walaupun akhirnya ini dapat dipandang sebagai sebuah kemajuan dengan harapan nilai dan norma demokrasi dan HAM menjadi standar baku negara anggota.

Demokrasi: Antara Konsep dan Implementasi

Buku ini juga menyoroti satu masalah besar yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN, yaitu minimnya implementasi di tingkat domestik setelah dicapai kesepakatan di tingkat regional. Dokumen Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN telah mendefinisikan tiga aksi promosi demokrasi berupa: kampanye demokrasi pada generasi muda, diseminasi pandangan dan pengalaman demokrasi dalam bentuk seminar dan pelatihan, serta melakukan penelitian untuk menguatkan prinsip-prinsip demokrasi (Sekretariat ASEAN, 2009). Sayangnya, ketiga aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong negara anggota ASEAN yang sistem politiknya belum demokratis untuk melakukan perubahan. Seperti diketahui secara umum, sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara tidak monolitik dan belum sepenuhnya berada di tangan rakyat. Terlebih dengan adanya norma *non-interference* yang menolak adanya campur tangan pihak luar dalam urusan politik domestik apalagi hingga mengganti sistem politik pemerintahan.

Tidak semua negara di Asia Tenggara mengadopsi sistem demokrasi dengan basis suara rakyat, apalagi ketika melihat praktik-praktik demokrasi yang diangkat dalam buku ini. Sebagai contoh, Singapura yang mengklaim diri sebagai negara demokratis dengan sistem multi partai, tetapi menerapkan “*electoral authoritarian*” yang membuat satu partai akan terus menjadi dominan (Poole, 2019). Thailand dengan raja sebagai lambang negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu juga mengalami beberapa kali penggulingan kekuasaan oleh pihak militer. Menurut Poole (2019), penggunaan retorik demokrasi di level ASEAN diduga untuk meningkatkan legitimasi dunia internasional di tengah praktik-praktik non-demokratis anggotanya.

Lebih lanjut, sistem politik di setiap negara anggota ASEAN berbeda-beda, seperti sistem monarki absolut di Brunei Darussalam, sistem satu partai komunis di Laos dan Vietnam, dan sistem presidensial banyak partai di Filipina dan Indonesia. Beragam laporan mengindikasikan proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara mengalami penurunan. Di Indonesia misalnya, menjelang pemilihan umum 2024, berhembus isu bahwa TNI/Polri akan ditunjuk menjadi pejabat daerah (gubernur, bupati) seperti pada masa Orde baru Soeharto (CNN Indonesia, 2019). Poole sendiri meragukan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar kompleksitas definisi demokrasi menurut para ahli (Poole, 2019). Namun uniknya, yang merupakan argumentasi utama buku ini menyatakan bahwa ASEAN memproyeksikan diri sebagai *global citizen* yang menerima nilai-nilai global sekalipun berbeda dengan kondisi domestik. ASEAN sangat memperhatikan bagaimana persepsi dunia terhadap dirinya.

Proses internalisasi nilai-nilai demokrasi yang telah diadopsi di tingkat ASEAN belum sepenuhnya terjadi di level domestik negara-negara anggota. Terbukti dengan masih dilanggarnya prinsip demokrasi yang sedang dalam proses penemuan model ideal, sebagaimana kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada awal tahun 2021. Kekerasan yang diterima oleh para demonstran bukan

saja mencederai demokrasi itu sendiri, tetapi juga telah merobek hak paling dasar manusia, yaitu rasa aman. Pemerintah yang diharapkan memberikan rasa aman justru menjadi sumber ancaman. Dilaporkan juga bahwa kekerasan aparat telah melenyapkan ratusan nyawa demonstran yang mendukung proses demokratisasi sejak bulan Februari 2021 (Human Rights Watch, 2021). Hasil pemilihan umum Myanmar 2020 dengan kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Myanmar membutuhkan perubahan.

Gap antara praktik dan realitas demokrasi di kawasan disebabkan salah satunya karena adanya perbedaan definisi mengenai demokrasi yang dimiliki oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Di Indonesia, ada demokrasi terpimpin ala Soekarno dan demokrasi Pancasila versi Soeharto. Presiden Soekarno menjabat selama 21 tahun dan sempat diajukan sebagai presiden seumur hidup, sedangkan Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Secara sekilas, para pemimpin ini menjunjung nilai-nilai demokrasi dan memimpin atas nama demokrasi, tetapi pada praktiknya banyak yang mengkritik kebijakan ini, dan tren seperti ini sering juga ditemukan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dengan beragamnya praktik demokrasi yang terjadi, Poole menyatakan bahwa term demokrasi sebagai norma kawasan menjadi bermasalah (Poole, 2019).

Sebaiknya ditambahkan satu paragraf sebagai penutup/wrap up bagian ini. Paparan di atas mayoritas adalah isi dari buku, bagaimana pandangan penulis review ini terhadap isi buku? Paragraf terakhir di bagian ini masih menggantung.

Hak Asasi Manusia dan Organisasi Kawasan

Selain melihat kasus demokratisasi di negara anggota ASEAN, Poole juga menyajikan studi kasus. Penulis buku sadar bahwa negara-negara non-demokratis yang juga banyak melakukan pelanggaran HAM menyepakati norma demokrasi dan HAM hanya sebagai legitimasi. Hal ini pun disadari oleh ASEAN, yang

kemudian mendorong lahirnya Piagam ASEAN yang diharapkan dapat mengikat perilaku para negara anggota.

ASEAN mencoba untuk mengadopsi norma-norma liberal semenjak terjadinya krisis ekonomi di akhir tahun 90an di kawasan Asia Tenggara. Penyerapan nilai-nilai demokrasi dan HAM menjadi sebuah tiket untuk dapat diterima dalam pergaulan internasional. Apalagi, negara anggota ASEAN sangat membutuhkan investasi dari luar. Ide ini bukan tanpa perlawanan dari negara anggota lainnya, termasuk Vietnam, Kamboja, Laos dan Brunei. Untuk merealisasikan ide ini dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk negosiasi. Syarat-syarat yang disepakati dari hasil negosiasi tersebut berupa dibentuknya organisasi HAM ASEAN melalui penunjukan pemerintah, tidak saling menyalahkan negara lain, dan berkarakteristik Asia Tenggara. Tentu saja badan HAM kawasan, yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) memiliki mandat terbatas, serta tidak leluasa menjalankan fungsi dan tugasnya.

Masih dalam kerangka konseptual external regional legitimacy (ERL), dalam buku ini, Poole (2019) berargumen bahwa ASEAN akan selalu mendorong dirinya bekerja atau penggunaan kata-kata diplomatis agar terhindar dari sorotan internasional. ASEAN tidak dapat berdiam diri karena akan mempertaruhkan kredibilitas dan relevansi ASEAN. Dalam kasus kudeta Myanmar misalnya, Indonesia mendorong *ASEAN Summit Meeting* untuk mengeluarkan keputusan demi memecahkan persoalan. Sayangnya, ASEAN dituding mendukung pemerintah militer karena lambat bergerak dan kurang tegas terhadap Myanmar, seolah mengulang kegagalan ASEAN dalam merespons kasus demonstrasi umat Buddha dan kekerasan terhadap suku muslim Rohingya sebelumnya. Respons yang dilakukan oleh ASEAN patut diapresiasi apabila keputusan yang sudah dibuat segera dieksekusi dan tidak menunggu waktu lama. Lambatnya (keengganan) Junta Militer dalam menerima *special envoy* dalam kasus Myanmar menandakan turunnya kredibilitas ASEAN bagi anggotanya sendiri.

Myanmar telah beberapa kali menjadi batu sandungan diplomasi internasional ASEAN. ASEAN, misalnya diminta Uni Eropa untuk mengeluarkan Myanmar dari pertemuan negosiasi perdagangan akibat pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Saat Myanmar belum menjadi anggota, ASEAN cenderung dapat menyelesaikan persoalan domestik seperti persoalan-persoalan yang terjadi antara lima negara pendiri ASEAN. Tatkala menjadi anggota ASEAN, Myanmar menggunakan norma *non-interference* yang berlaku dan seolah melupakan nilai dan norma ASEAN lainnya seperti demokrasi dan HAM. Padahal norma-norma itu tercantum dalam Piagam ASEAN yang seharusnya diakui Myanmar. Seharusnya *non-interference* memiliki keterbatasan yakni tidak melanggar hak asasi manusia yang disepakati bersama negara anggota.

Kebebasan berpendapat juga menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Oposisi di Singapura dan Malaysia selalu mendapat tekanan dari penguasa. Untuk kasus Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat sering mengalami hambatan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menafsirkan kritik seolah penghinaan. Dalam beberapa kasus, masyarakat takut mengutarakan pendapat dan kritiknya karena akan diancam hukuman penjara (Tempo, 2014).

Norma dan Kelembagaan

Jika tidak ada perubahan, ASEAN akan dipandang tidak relevan karena norma hanya dijadikan tameng agar tidak menjadi sorotan sekaligus sebagai tiket masuk dalam pergaulan internasional. Peran ASEAN seharusnya mendorong nilai-nilai demokrasi dan HAM berlaku di kawasan dengan kemauan rakyat sebagai sumber. Jika tidak dibenahi, akan selalu ada pertentangan antara penegakan demokrasi dan HAM dengan kedaulatan dan tidak adanya campur tangan urusan domestik. ASEAN secara perlahan berproses dalam menyerap nilai-nilai dan norma kebebasan (Dosch, 2008). Proses yang dilakukan oleh ASEAN bukan sekadar dipengaruhi aktivisme prodemokrasi, tetapi juga harus mendapat dorongan dari pemimpin

anggota ASEAN (Dosch, 2008). Dalam hal ini, proses pengakuan atas nilai-nilai liberal menjadi satu kemajuan yang perlu didorong lebih lanjut dan tidak berhenti pada pembentukan dokumen semata. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya penting untuk para pemimpin atau bersifat elitis, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan dapat berfungsi sebagai media aspirasi yang efektif.

Ada beberapa catatan sebagai hasil bacaan buku ini. *Pertama*, narasi pertentangan individual versus bersama dan nilai Asia versus nilai Barat diakui penulis tidak dieksplorasi mendalam dalam buku ini. Sepanjang penjelasan, buku ini menggunakan ERL sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku paradoks ASEAN. Sayangnya, buku ini belum menjelaskan mengapa Presiden Filipina Duterte berulang kali menantang komunitas internasional yang mengkritik kebijakannya dalam menumpas perdagangan narkoba. Seolah tidak terlalu mementingkan persepsi dunia internasional terhadap imaji Filipina sebagai negara demokratis. Untuk kasus Myanmar sendiri, negara ini pernah mengalami kudeta militer sebelum tahun 2021 yaitu di tahun 1962 dan memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM. Supermasi militer atas sipil yang bersifat ototritter di negara ini menjadi penghalang proses demokratisasi yang telah diusahakan dalam beberapa tahun belakang.

Selebihnya, kekuatan buku ini terletak pada kekayaan referensi yang dikutip, baik berupa laporan, dokumen resmi, pidato, dan berita. Poole juga mewawancarai tokoh-tokoh kunci di kementerian luar negeri, diplomat, dan para peneliti di lembaga riset dan universitas di negara-negara ASEAN. Dalam mendalami beragam referensi tersebut, Poole menyoroti bagaimana norma di ASEAN dibangun dan secara hati-hati melihat kasus per kasus di negara anggota. Buku ini mendiskusikan perdebatan mengenai posisi ASEAN sebagai variabel bebas atau sebagai variabel terikat yang saling membentuk. Poole memandang ASEAN dalam kasus demokrasi dan HAM masih menjadi variabel terikat dengan asumsi bahwa tatanan politik domestik memengaruhi keputusan kawasan. Buku ini layak dibaca

oleh para pemangku kebijakan, peneliti dan mahasiswa yang mendalami kajian mengenai regionalisme dan ASEAN.

Daftar Pustaka

- ASEAN, Sekretariat. (2009) Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- CNN Indonesia. (2021) Pakar Ungkap Celah Aturan TNI-Polri Jadi Gubernur 2022-2024. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210928145049-32-700509/pakar-ungkap-celah-aturan-tni-polri-jadi-gubernur-2022-2024> pada tanggal 01 Oktober 2021.
- Dosch, Jorn. "ASEAN's Reluctant Liberal Turn and the Thorny Road to Democracy Promotion". *The Pacific Review*, Vol. 21 No. 4 December 2008: 527–545. DOI: [10.1080/09512740802294655](https://doi.org/10.1080/09512740802294655)
- Harper, T.N. (1997) 'Asian Values' and Southeast Asian Histories. *The Historical Journal* Vol. 40, No. 2 (Jun, 1997), pp. 507-517
- Human Rights Watch. (2021) Myanmar: Hundreds Forcibly Disappeared. Diakses dari <https://www.hrw.org/news/2021/04/02/myanmar-hundreds-forcibly-disappeared> pada tanggal 01 Oktober 2021.
- Idhom, Addi Mawahibun. (2014) UU ITE Dinilai Membuat Narasumber Kritis Takut. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/622174/uu-ite-dinilai-membuat-narasumber-kritis-takut/full&view=ok> pada tanggal 25 Januari 2022.
- Inayati, Ratna Shofi (Ed). (2016) Demokrasi dan HAM di ASEAN. Tangerang: Mahara Publishing.
- Poole, Avery. (2019) *Democracy, Rights, and Rhetoric in Southeast Asia*. Cham: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-15522-3>
- Simon, Sheldon W. (1995). *Realism and neoliberalism: International relations theory and Southeast Asian security*. *The Pacific Review*, 8(1), 5–24. doi:10.1080/09512749508719123
- Sinaga. Lidya Christin (Ed). (2013) Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di ASEAN. Jakarta: LIPI Press.